

Jakarta Masih Langganan Banjir, Ini Solusi PUPR

JAKARTA (IM) - Banjir adalah persoalan yang sejak lama melanda Jakarta. Fenomena tersebut sudah terjadi sejak zaman Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Walhasil, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempuh berbagai cara untuk mengatasi persoalan itu.

Salah satunya adalah dengan membangun Bendung Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Bendungan itu adalah salah satu dari sejumlah infrastruktur pengendali banjir Jakarta yang dibangun di Kota Hujan.

"Diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 22 Desember 2022, Bendungan Sukamahi berlokasi di Desa Sukamahi, Kabupaten Bogor, tepatnya di hulu Sungai Cisukabirus yang merupakan anak Sungai Ciliwung," tulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui akun Instagram resminya, dikutip Senin (13/5).

PUPR kemudian menjelaskan, bahwa Bendungan Sukamahi adalah bendungan

pertama di Indonesia yang berjenis bendungan kering (dry dam) selain Bendungan Ciawi. Bendungan bertipe kering bekerja dengan menampung air hujan sementara. Air dialirkan sekecil mungkin ke Sungai Ciliwung.

Bendungan itu akan tergenang air ketika musim hujan dan cenderung kering ketika musim kemarau.

"Dengan daya tampung 1,68 juta m³ dan luas genangan 5,23 hektare, bendungan ini dapat mereduksi banjir Jakarta sebesar 15,47 m³/detik atau 11,9%," lanjut PUPR.

Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, Bendungan Sukamahi pun punya fungsi lain yakni sebagai lokasi ekowisata alternatif di kawasan Puncak sekaligus tempat konservasi air berkelanjutan.

Ada sejumlah fasilitas di Bendungan Sukamahi yang bisa dimanfaatkan pengunjung, mulai dari penginapan, taman, rumah kaca, tempat ibadah, pertanian hidroponik, serta ecopark. ● yan

Kualitas Udara Jakarta Senin Pagi tidak Sehat

JAKARTA (IM) - Kualitas udara di DKI Jakarta berada dalam kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara, pada Senin (13/5) pagi.

Data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.35 WIB menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 105, dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2,5 di angka konsentrasi 37 mikrogram per meter kubik.

Konsentrasi tersebut setara 7,4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini tersebut pun mencatatkan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara peringkat kesepuluh terburuk di dunia.

Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Senin adalah Delhi (India) dengan indeks kualitas udara di angka 197, diikuti Dhaka (Bangladesh) di angka 185 dan Tashkent (Uzbekistan) di angka 144.

Sejumlah wilayah di Jakarta yang tercatat memiliki kualitas udara dengan

kategori tidak sehat, yakni Cilandak Barat, Jeruk Purut dan Kalideres.

Masyarakat pun direkomendasikan untuk menghindari aktivitas di luar ruangan, khusus kelompok sensitif sebaiknya mengenakan masker saat di luar, menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor serta menyalaikan penyaring udara.

Sementara itu, Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa kualitas udara di Jakarta secara keseluruhan untuk polusi udara PM2,5 berada pada kategori sedang dengan indeks di angka berkisar 75-91.

Kategori sedang berarti tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif.

Sebelumnya, BMKG mengungkapkan bahwa Jakarta mulai memasuki musim kemarau pada Mei dan diprediksi mencapai puncaknya pada Juni 2024. Bersamaan dengan itu, Jakarta diprediksi kembali dilanda polusi udara. ● yan

Hanya Satu Pasangan Independen Antarkan Syarat Dukungan Pilgub Jakarta

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan hanya ada satu pasangan calon independen atau perseorangan yang mengantarkan syarat dukungan calon gubernur dan calon wakil gubernur sampai dengan hari terakhir penyerahan berkas.

"Kami umumkan hingga batas terakhir penyerahan syarat dukungan untuk perseorangan atau independen pada pukul 23.59 WIB, hanya ada satu pasangan yakni Dharma Pongrekun- Kun Wardhana," kata anggota KPU DKI Astri Megatari di Jakarta, Minggu (12/5).

Ia mengatakan KPU DKI Jakarta resmi menutup penyerahan dokumen syarat dukungan untuk bakal calon perseorangan atau independen Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana menyerahkan syarat du-

kungan melalui aplikasi pasangan pencalonan (Silon) sekitar 28%. "Kami akan lakukan pemeriksaan berkas syarat dukungan ini," kata dia.

Sementara itu anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana menyatakan syarat dukungan yang diunggah melalui aplikasi Silon sekitar 160 ribuan dan syarat dukungan dalam bentuk fisik sekitar 690 ribuan.

"Kami hanya menghitung jumlah saja. Jadi nanti benar tidaknya itu dalam tahap verifikasi. Jadi penerimaan ini hanya menerima saja, ada atau tidak ada, lengkap atau tidak lengkap saja," kata dia.

Ia mengatakan pihaknya akan mengeluarkan berita acara penerimaan berkas jika jumlahnya memenuhi batas minimal di angka 618.968 dukungan.

Jumlah tersebut sesuai dengan Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 47 tahun 2024 yang mencantumkan bakal calon independen harus memiliki dukungan masyarakat sebesar 7,5% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) DKI Jakarta di pemilu sebelumnya 8,2 juta pemilih.

"Tapi jika belum memenuhi batas minimal kami akan kembalikan kembali syarat ini kepada pasangan calon," kata dia. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



GROUND BREAKING TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH JAKARTA

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (keenam kiri) bersama pihak terkait meneken tombol saat *groundbreaking* pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) atau tempat pengolahan sampah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (13/5). Tempat pengolahan sampah yang dibangun pada lahan seluas 7,87 hektare dengan biaya Rp1,28 triliun dari APBD DKI Jakarta tahun 2024 tersebut dapat mengolah 2.500 ton sampah per harinya dan ditargetkan akan beroperasi pada awal tahun 2025.

PENGOLAHAN SAMPAH TERBESAR DI INDONESIA

Heru Budi *Groundbreaking* Proyek RDF Rorotan, Beroperasi Awal Mei 2025

Pembangunan fasilitas pengolahan sampah ini dilakukan dengan metode konstruksi terintegrasi. RDF Rorotan dibangun di lahan seluas 7,87 hektare dengan biaya Rp 1,28 triliun yang bersumber dari APBD DKI Jakarta tahun 2024. RDF ini akan mengolah sampah dari 16 kecamatan di Jakarta.

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan peletakan batu pertama atau *groundbreaking*

pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. Heru Budi mengatakan RDF ini merupakan tempat pengolahan

sampah terbesar di Indonesia.

Pada peletakan batu pertama RDF Plant Jakarta, Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (13/5), Heru Budi didampingi Sekretaris Daerah DKI, Joko Agus Setyono dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Asep Kuswanto.

"Ini yang terbesar di Indonesia dan ini adalah bagian terkecil upaya pemda untuk mengatasi dampak banyaknya sampah di Jakarta," kata Heru Budi.

"Fasilitas di Rorotan ini tersebut bisa mengolah sam-

pah hingga 2.500 ton/hari dan sudah sesuai spesifikasi industri," lanjutnya.

Kadis LH DKI, Asep Kuswanto mengatakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah ini dilakukan dengan metode konstruksi terintegrasi.

RDF Rorotan ini dibangun di lahan seluas 7,87 hektare dengan biaya Rp 1,28 triliun yang bersumber dari APBD DKI Jakarta tahun 2024.

"Ini memang proyek yang cukup singkat, dengan nilai proyek 1,28 triliun. Jadi masa pengerjaannya diharapkan di Desember 2024 ini bisa selesai, dan dapat beroperasi optimal pada awal 2025," ujar Asep

Asep mengatakan 2.500 ton per hari akan diolah di RDF Rorotan. Dia menyebut RDF ini akan mengolah sampah dari 16 kecamatan di Jakarta. "Terdiri dari seluruh Kecamatan wilayah Jakarta Utara ada enam Kecamatan Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Kecamatan di Jakarta Pusat yaitu Cempaka Putih, Kemayoran Baru, dan Senen, dan enam kecamatan di Jakarta Timur," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah membangun RDF di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Pemprov DKI kemudian mempercepat pembangunan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant Rorotan. ● yan

Acara Penyambutan Bhikkhu Thudong di Taman Mini 14 Mei 2024

JAKARTA (IM) - Dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Waisak 2568 BE (Buddhist Era), akan dilaksanakan Bhikkhu Thudong menuju Candi Borobudur. Untuk itu akan diselenggarakan acara penyambutan Bhikkhu Thudong saat tiba di Jakarta.

Diketahui, sebanyak 40 Bhikkhu akan melakukan perjalanan Thudong dari Jakarta ke Candi Borobudur dalam rangka peringat Waisak. Untuk menyambut dan melepas keberangkatannya, diadakan acara yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMI).

Seperti dilansir akun Instagram resmi Taman Mini (@tmiioficial), pada tanggal 14 Mei 2024 sebanyak 40 Bhikkhu akan memulai perjalanan Thudong dari

Taman Mini ke Candi Borobudur. Acara tersebut dapat diikuti oleh masyarakat umum.

"14 Mei 2024 mendatang, 40 Bhikkhu akan memulai perjalanan Thudong ke dari @tmiioficial ke @borobudurpark untuk menyambut #WaisakdiBorobudur. Apakah kamu akan jadi satu dari ribuan orang yang akan melepas keberangkatan mereka?" tulisnya.

Acara penyambutan sekaligus pelepasan Bhikkhu Thudong di Taman Mini bertepatan "Enlightened in Harmony" ini akan diselenggarakan pada Selasa (14/5) mulai pukul 16.00 WIB. Acara juga akan diisi dengan berbagai kegiatan lainnya.

"Selain pelepasan Thudong, kamu juga bisa berpartisipasi dalam walking

meditation dan larung lentera di sekitar Danau Archipelago, lho. Kehadirannya akan sangat berarti untuk tunjukkan harmoni!" demikian keterangan akun TMI.

Berikut informasi jadwal kegiatannya:
Pukul 16.00 - 17.30 WIB Acara Sesi Pengambilan Lentera Air dan menuliskan harapan. Lokasi di Anjungan Yogyakarta

Pukul 17.30 - 18.30 WIB Acara Seremoni doa lintas agama dan pelepasan satwa. Lokasi di Promenade Archipelago.

Pukul 18.30 - 18.50 WIB Acara Dancing Fountain Show. Lokasi di Promenade Archipelago

Pukul 18.50 - 19.30 WIB Acara Walking meditation & Larung lentera Harapan Semesta. Lokasi di Archipelago. ● yan

Bawaslu Ingatkan Heru Budi Tak Rotasi Pejabat DKI Jelang Pilkada

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI melayangkan surat ke Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Koordinator divisi hukum pendidikan dan pelatihan Bawaslu DKI Jakarta, Sakhroji mengatakan, surat itu dilayangkan sejak awal April 2024. Isi dalam surat itu terkait imbauan agar Heru tak merotasi pejabat DKI jelang Pilkada 2024. "Iya surat itu dilayangkan ke Pak Pj (Gubernur DKI Heru Budi) langsung pada tanggal 5 April 2024" ujar Sakhroji saat dikonfirmasi, Senin (13/5).

Adapun tujuan surat itu dilayangkan kepada Heru Budi untuk mengantisipasi adanya pelanggaran pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024.

Larangan kepala daerah merotasi anak buahnya jelang Pilkada itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 190 berbunyi "Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000". ● yan

persetujuan tertulis dari menteri".

"Jadi (larangan merotasi pejabat itu) enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (kepala daerah), bukan enam bulan sebelum pencoblosan," kata Sakhroji.

Sementara itu, Pasal 162 ayat (3) berbunyi "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri".

Dengan demikian, kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang melakukan mutasi pejabat jelang Pilkada 2024 berpotensi akan disanksi pidana, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 190 berbunyi "Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000". ● yan

PENGUMUMAN
Bahwa berdasarkan akta tanggal 13-03-2024, Nomor 12, yang dibuat dihadapan YUPI NURLIA DEWI, Sarjana Hukum, Magister Kertanaratan, Notaris di Kabupaten Bandung, telah ditandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembubaran Perseroan Terbatas PT. IRIGASI PETANI NUSANTARA berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Bahwa setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari ternyata tidak ada kreditor maupun pihak ketiga lain yang mengajukan tagihan atau tuntutan kepada Perseroan sehingga pembagian sisa likuidasi telah selesai dilaksanakan oleh likuidator PT. IRIGASI PETANI NUSANTARA, dan dengan demikian berdasarkan Surat Penyerahan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT. IRIGASI PETANI NUSANTARA, tertanggal 05-04-2024 Nomor AHU-AH.01.10-0022483 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
LIKUIDATOR
NYONYA ANNISA ANINDITA



KETUM PDIP KUNJUNGI PAMERAN TUNGGAL BUTET KARTAREDJASA

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi seniman Butet Kartaredjasa (kiri) meninjau Pameran Seni Rupa Butet Kartaredjasa Melik Nggendong Lali di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (13/5). Megawati menilai karya seni yang ditampilkan dalam pameran tunggal Butet Kartaredjasa itu dibuat dengan artistik, penuh kreativitas, dan imajinasi.

PENGUMUMAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PAM NAMA SEJAHTERA, (Perseroan) tertanggal 28 Maret 2024 nomor 59, dibuat dihadapan STEPHANIE WILLAMARTA, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disor kepada pemegang saham yaitu:
- Tuan ADY SOEMASTO sebesar Rp 30.936.000.000,-
- Tuan SIAU SURYA PUTRA SUBANDI sebesar Rp 6.698.000.000,-
- Tuan LIE NGAN KENG sebesar Rp 6.320.000.000,-
- Tuan PAULUS SIA sebesar Rp 6.320.000.000,-
- Nyonya LINDA WIRIAMAN sebesar Rp 1.048.000.000,-
- Tuan AGUSTINUS sebesar Rp 478.000.000,-
Jakarta, 14 Mei 2024
Direksi Perseroan